

BAB II

PENGERTIAN DAN KONSEP HIRARKI, PRASARANA DAN SARANA KOTA

2.1 Perencanaan Pembangunan dan Karakteristik Wilayah

Perencanaan adalah sebagai upaya suatu institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Artinya, dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada di wilayah tersebut (Widodo, 2006). Menurut Conyers dan Hills (1994), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Munir (2002) mengemukakan definisi pembangunan adalah sebagai upaya untuk melakukan perubahan guna mewujudkan kondisi yang lebih baik, baik secara material maupun spiritual. Dalam hubungan ini, pembangunan memerlukan adanya rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem kemasyarakatan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Sedangkan, Siagian dalam Munir (2002:25) mengemukakan bahwa pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu kelompok masyarakat untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Sementara itu, Todaro dalam Munir (2002:25) berpendapat bahwa pembangunan merupakan proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diambil beberapa hal pokok, yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu upaya perbaikan;
2. Ada rangkaian/aktifitas yang dilakukan;
3. Didasarkan suatu rencana; dan
4. Bermuara pada suatu tujuan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu wilayah, sehingga dalam perencanaan pembangunan perlu diperhatikan berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Wilayah dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai satu kesatuan ruang secara geografi yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya. Daerah dapat didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai batas secara jelas berdasarkan yuridiksi administratif. Dari istilah tersebut, wilayah menunjuk ruang pada permukaan bumi secara umum tanpa konotasi tentang isi, karakter, maupun kepentingan yang terkait dengannya. Artinya, istilah wilayah dapat digunakan secara fleksibel dan mencakup penggunaan ruang secara umum (Robinson, 2005). Pengertian lain wilayah menurut Glasson (1974) dalam Robinson (2005:111) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu secara subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu model agar kita bisa membedakan lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Pandangan objektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah. Wilayah bisa dibedakan berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan ciri-ciri diatas.

2.2 Pengertian Kota dan Desa

2.2.1 Pengertian Kota

Secara umum kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah dan lain-lain. Kota berasal dari kata urban yang mengandung pengertian kekotaan dan perkotaan. Kekotaan menyangkut sifat-sifat yang melekat pada kota dalam artian fisik, sosial, ekonomi, budaya. Perkotaan mengacu pada areal yang memiliki suasana penghidupan dan kehidupan modern dan menjadi wewenang pemerintah kota (Mirsa, 2012:9). Dalam tinjauan geografi, kota adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya (Bintarto, 1983). Sementara itu, menurut Robinson (2005) kota merupakan suatu tempat permukiman atau

tempat berbagai kegiatan yang memiliki fungsi berbeda dari daerah pedesaan dengan menjadikan kegiatan basis utama berupa sektor penghasil barang serta sektor perdagangan dan jasa asalkan kegiatan tersebut mendatangkan uang dari luar wilayah. Dalam menetapkan apakah suatu konsentrasi permukiman itu sudah dapat dikategorikan sebagai kota atau belum, maka perlu ada kriteria yang jelas untuk membedakannya. Salah satu kriteria yang umum digunakan adalah jumlah dan kepadatan penduduk.

Badan Pusat Statistik (BPS), dalam pelaksanaan survei penetapan status desa/kelurahan sebagai kota pada tahun 2000 (Robinson, 2005: 124-125) menggunakan beberapa kriteria yaitu

1. kepadatan penduduk per kilometer persegi,
2. persentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian atau non-pertanian,
3. persentase rumah tangga yang memiliki telepon,
4. persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik,
5. sarana perkotaan yang ada di desa/kelurahan, seperti sarana pendidikan, pasar, tempat hiburan, kompleks pertokoan dan sarana lain.

Masing-masing sarana diberi skor. Atas dasar skor tersebut maka dapat ditetapkan kedalam salah satu kategori perkotaan besar, perkotaan sedang, perkotaan kecil dan pedesaan.

Kriteria (BPS) diatas hanya didasarkan atas kondisi (besaran) fisik dan mestinya dilengkapi dengan melihat apakah tempat konsentrasi tersebut menjalankan fungsi perkotaan. Selain itu, perlu ditambah dengan kriteria bahwa konsentrasi itu berfungsi melayani daerah belakangnya. Artinya, berbagai sarana yang ada di tempat itu seperti perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan tidak hanya melayani/dimanfaatkan oleh penduduk kota itu sendiri, tetapi juga melayani masyarakat yang datang dari luar kota yang sering disebut sebagai daerah belakangnya. Pada dasarnya untuk melihat apakah konsentrasi itu sebagai kota atau tidak adalah dari seberapa banyak jenis sarana perkotaan yang tersedia dan seberapa jauh kota itu menjalankan fungsi perkotaan. Sarana/fungsi perkotaan antara lain sebagai berikut.

1. Pusat perdagangan yang tingkatannya dapat dibedakan atas: melayani masyarakat kota itu sendiri, melayani masyarakat kota dan daerah pinggiran (daerah yang berbatasan), melayani beberapa kota kecil (pusat kabupaten), melayani pusat

provinsi atau pusat kegiatan perdagangan antar pulau/ekspor di provinsi tersebut dan pusat beberapa provinsi sekaligus.

2. Pusat pelayanan jasa, baik jasa perorangan maupun jasa perusahaan. Jasa perorangan misalnya tukang pangkas, salon, tukang jahit, pengacara, dokter, notaris dan warung kopi/nasi. Jasa perusahaan misalnya perbankan, perhotelan, asuransi, pengangkutan, pelayanan pos dan jasa penyewaan peralatan.
3. Tersedianya prasarana perkotaan seperti sistem jalan kota yang baik, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, pelayanan sampah, sistem drainase, taman kota dan pasar.
4. Pusat penyediaan sarana perkotaan seperti prasarana pendidikan dengan berbagai tingkatannya, prasarana kesehatan dengan berbagai tingkatannya, tempat ibadah, prasarana olahraga dan prasarana perkotaan.
5. Pusat pemerintahan, banyak kota yang sekaligus merupakan lokasi pusat pemerintahan. Kota terbesar di suatu provinsi seringkali adalah pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan turut mempercepat tumbuhnya suatu kota karena banyak masyarakat yang perlu datang ke tempat itu untuk urusan pemerintahan.
6. Pusat komunikasi dan pangkalan transportasi, artinya dari kota tersebut masyarakat bisa berhubungan ke banyak tujuan dengan berbagai pilihan alat penghubung serta bisa berpergian langsung ke berbagai tujuan dengan berbagai pilihan alat transportasi.
7. Lokasi permukiman yang tertata, suatu lokasi dikatakan kota karena jumlah penduduknya yang banyak. Penduduk membutuhkan tempat tinggal. Hal ini berarti kota sekaligus merupakan lokasi permukiman, mestinya permukiman itu kelihatan teratur/tertata karena harus meminta IMB apabila ingin membangun.

Semakin banyak fungsi dan sarana perkotaan makin meyakinkan bahwa lokasi konsentrasi itu adalah sebuah kota. Kota yang telah berkembang maju mempunyai peranan yang lebih luas lagi antara lain sebagai berikut (Mirsa, 2012:10).

1. Sebagai pusat permukiman penduduk;
2. Sebagai pusat kegiatan ekonomi;
3. Sebagai pusat kegiatan sosial budaya;
4. Pusat kegiatan politik dan administrasi pemerintahan serta tempat kedudukan pemimpin pemerintahan.

Adapun beberapa ciri fisik kota yang menjadi ciri khas bentuk kota yaitu meliputi hal sebagai berikut.

1. Tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan;
2. Tersedianya tempat-tempat untuk parkir;
3. Terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga.

Adapun beberapa ciri kehidupan kota yang meliputi kegiatan adalah:

1. Adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan;
2. Adanya profesi yang beragam yang tentunya berdasarkan keahlian masing-masing diantaranya seperti buruh pabrik, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, penulis, motivator dan lain-lain;
3. Adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial diantara warganya;
4. Adanya keberagaman suku yang mendiami sebuah kota, semuanya berkumpul untuk mencapai tujuan yang beragam seperti bekerja, sekolah, mencari penghidupan baru dan beragam tujuan lainnya;
5. Adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi dan kondisi kehidupan;
6. Adanya persaingan yang tinggi diakibatkan dari pola urbanisasi penduduk dari desa ke kota untuk meningkatkan taraf hidup sehingga persaingan di kota semakin tinggi serta untuk memenangkan persaingan tersebut menggunakan segala macam cara;
7. Warga kota umumnya sangat menghargai waktu;
8. Cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomi;
9. Masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar;
10. Pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat individu sedangkan sifat solidaritas dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi.

Adapun pengertian lain tentang kota, para ahli memberikan beberapa pengertian dilihat dari berbagai sudut pandang dan keilmuannya masing-masing, yaitu (Daldjoeni, 2014:30-32).

1. Mayer melihat kota sebagai tempat bermukim penduduknya; baginya yang penting dengan sendirinya bukan rumah tinggal, jalan raya, rumah ibadah, kantor, taman, kanal dan sebagainya, melainkan penghuni yang menciptakan segalanya itu.
2. Mumford lebih melihat kota sebagai suatu tempat pertemuan yang berkiblat keluar. Malah sebelum kota menjadi tempat tinggal tetap, orang-orangnya pulang-balik dari pedesaan untuk berjumpa secara teratur.
3. Weber memandang suatu tempat itu kota, jika penghuninya sebagian besar telah mampu memenuhi kebutuhannya lewat pasar setempat. Hal ini yang menjadi ciri khas kota yaitu pasarnya.
4. Menurut Wirth, kota adalah permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Karena itu hubungan sosial antar penghuninya serba longgar, acuh dan relasinya tidak pribadi (*impersonal relations*).
5. Menurut Budiharjo (2005), kota merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang paling rumit disepanjang peradaban. Struktur merupakan bentuk dan wajah serta penampilan kota, merupakan hasil penyelesaian konflik perkotaan yang selalu terjadi dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota maupun pengelolanya;
6. Menurut Peraturan Mendagri RI No. 2/1987, kota adalah suatu wadah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

Dari beberapa pengertian kota menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kota merupakan suatu daerah yang memiliki wilayah batas administrasi dan bentang lahan luas, penduduk relatif banyak, adanya heterogenitas penduduk, sektor agraris sedikit atau bahkan tidak ada dan adanya suatu sistem pemerintahan.

2.2.2 Pengertian Desa

Desa dalam arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berjiwa agraris. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut juga kampung, lalu ada ungkapan 'pulang ke kampung' atau kampung halaman (Daldjoeni, 2014:49). Desa dalam arti administrasi adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Kartohadikoesoemo, 1965). Menurut Robinson (2005), bahwa pedesaan umumnya yang menjadi kegiatan basis

adalah sektor penghasil barang seperti pertanian, industri dan pertambangan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Bintarto (1983), mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
2. Penduduk, yang meliputi berbagai hal tentang kependudukan seperti jumlah, persebaran, mata pencaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, meliputi segala hal yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

Syarat-syarat desa adalah mempunyai wilayah, adanya penduduk, mempunyai pemerintahan, berada langsung dibawah camat, mempunyai kebiasaan-kebiasaan pergaulan sendiri. Suatu desa tentu saja memiliki fungsi dan peran masing-masing. Fungsi yang dimaksud adalah desa sebagai sumber bahan pangan, penghasil bahan mentah, penghasil tenaga kerja dan pusat-pusat industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran desa diantaranya letak desa, keadaan iklim, kesuburan tanah, tata air, keadaan ekonomi dan keadaan budaya (Bintarto, 1983).

2.3 Pengertian Prasarana Kota

2.3.1 Pengertian Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi secara teknis terdiri atas (Munawar, 2005:125) :

1. Simpul (*node*) yakni berupa terminal, stasiun KA, bandara dan pelabuhan.
2. Ruas (*link*) yakni berupa jalan raya, jalan rel, rute angkutan udara, alur kepulauan Indonesia (ALKI). Sarana penyeberangan bukan merupakan simpul, melainkan bagian dari ruas yang sering juga disebut sebagai jembatan yang terapung.

Jaringan transportasi yang dominan berupa sistem jaringan jalan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang dimaksud jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dan peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Sedangkan yang dimaksud sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Jalan yang baik menurut Francis (1987:24) adalah yang mampu menampung pengguna dengan segala aktivitas yang berbeda-beda pula.

Karena itu dalam menata jaringan jalan perlu dikembangkan sistem hierarki jalan dan didukung oleh penataan ruang dan penggunaan lahan. Sistem jaringan jalan dibagi atas :

1. Berdasarkan wewenang pembinaan :

- Jalan Nasional, wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Pusat;
- Jalan Provinsi, wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Provinsi (Gubernur);
- Jalan Kabupaten, wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota);
- Jalan Desa, wewenang pembinaannya oleh masyarakat.

2. Berdasarkan peranan :

- Jalan arteri, yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi se-cara berdaya guna;
- Jalan kolektor, yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
- Jalan lokal, yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak di-batasi.

3. Berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST)

- Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan lebar $\leq 2,50$ m dan panjang ≤ 18 m dan MST ≤ 10 ton.
- Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan lebar $\leq 2,50$ m dan panjang ≤ 18 m dan MST ≤ 10 ton.

- Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan lebar $\leq 2,50$ m dan panjang ≤ 12 m dan MST ≤ 8 ton.
- Jalan kelas IIIB, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan lebar $\leq 2,50$ m dan panjang ≤ 12 m dan MTS ≤ 8 ton.
- Jalan kelas IIIC, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan lebar $\leq 2,10$ m dan panjang ≤ 9 m dan MST ≤ 8 ton.
- Untuk Jalan desa merupakan jalan yang melayani angkutan pedesaan dan wewenang pembinaannya oleh masyarakat serta mempunyai MST kurang dari 6 ton belum dimasukkan dalam UU No. 13 tahun 1980 maupun PP No. 43 tahun 1993.

Terbentuknya jaringan sirkulasi yang menghubungkan antar fungsi utama atau antar pusat kegiatan akan membentuk struktur ruang kota. Jadi struktur tata ruang menunjukkan elemen-elemen dan ruang kota yang berhubungan satu sama lain dengan adanya jaringan sirkulasi atau transportasi, yang berwujud (1) hierarki pusat pelayanan seperti pusat kota dan pusat pemerintahan; (2) prasarana jalan; (3) rancang bangun kota (Wongso, 2001).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 132 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang dimaksud simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. Sedangkan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terdapat beberapa tipe terminal antara lain :

1. Terminal Penumpang tipe A merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan pedesaan.
2. Terminal Penumpang tipe B merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.
3. Terminal Penumpang tipe C merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan.

2.4 Pengertian Sarana, Sarana Perkotaan, Jenis Sarana Perkotaan dan Penyediaan Sarana Perkotaan

2.4.1 Pengertian Sarana

Sarana perkotaan adalah suatu aktivitas atau ruang yang berfungsi melayani kebutuhan individu dalam suatu lingkungan kehidupan, dimana sarana dianggap sebagai produsen yang kemudian digunakan oleh konsumennya yaitu penduduk yang ada disekitar lokasi sarana tersebut. Menurut kamus tata ruang, sarana adalah jaringan dan/atau bangunan-bangunan yang memberi pelayanan dengan fungsi tertentu kepada masyarakat maupun perorangan berupa kemudahan kehidupan masyarakat dan pemerintah. Sarana merupakan salah satu pelengkap penunjang kehidupan masyarakat. Keberadaan sarana dapat memberikan kepuasan sosial, material dan spiritual bagi masyarakat.

Sarana merupakan faktor terpenting dalam perkembangan kehidupan perkotaan dan perdesaan. Tanpa adanya sarana yang cukup dan seimbang antara kebutuhan dan pemenuhan dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehingga secara otomatis juga berdampak pada perkembangan kota tersebut. Penyediaan sarana biasanya berada di dalam lingkungan perumahan dan permukiman. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman memberikan beberapa pengertian tentang sarana dan prasarana lingkungan, yaitu:

1. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Sarana lingkungan adalah sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
3. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas yang dimaksud dengan sarana adalah bangunan fisik pelengkap yang menunjang kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Dalam penyediaan sarana tersebut harus memenuhi berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap jumlah dan jenis sarana tersebut.

2.4.2 Sarana Perkotaan

Sarana perkotaan adalah aktivitas dan materi yang melayani kebutuhan masyarakat yang memberikan kepuasan sosial kepada masyarakat. Sarana perkotaan yang dimaksud adalah sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perdagangan dan jasa (Yeates, 1990). Menurut kamus penataan ruang, sarana perkotaan yaitu sarana yang dibutuhkan

masyarakat dalam lingkungan permukiman meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

Berdasarkan pedoman kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya oleh Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum menjelaskan yang dimaksud sarana perkotaan adalah sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta sarana penunjang kehidupan sosial lainnya di kawasan perkotaan.

2.4.3 Jenis Sarana Perkotaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Sarana Perkotaan Perumahan dan Permukiman menyebutkan jenis-jenis sarana perkotaan yang harus tersedia dalam suatu kawasan permukiman, yaitu berupa:

1. Sarana Pendidikan

Merupakan salah satu sarana yang memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Penyediaan sarana pendidikan ini ditentukan berdasarkan standar kebutuhan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, dimana standar tersebut merupakan kebutuhan ideal kuantitas yang memadai sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar.

2. Sarana Kesehatan

Merupakan sarana yang berfungsi melayani kebutuhan baik individu atau kelompok dalam bidang pelayanan kesehatan pada suatu lingkungan kehidupan. Keberadaan sarana kesehatan sangatlah mutlak diperlukan, karena menyangkut kelengkapan hidup manusia. Sarana kesehatan ini selain berfungsi sebagai kesehatan penduduk juga berfungsi sebagai pengendali perkembangan/pertumbuhan penduduk.

3. Sarana Perbelanjaan dan Niaga

Sarana ini berfungsi untuk melayani dan menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang dilengkapi dengan sarana-sarana pendukung yang dibutuhkan.

4. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Bangunan fisik yang berupa kantor pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan, pos keamanan dan keselamatan serta kantor pelayanan umum dan jasa.

5. Sarana Peribadatan

Merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani penduduk yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum serta keputusan masyarakat yang bersangkutan.

6. Sarana Rekreasi dan Kebudayaan

Bangunan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan dan rekreasi serta ruang ekspresi seni dari masyarakat berupa gedung kesenian, gedung serba guna dan lain sejenisnya. Penyediaan sarana ini berfungsi untuk memberikan keseimbangan kondisi psikologi pada masyarakat serta sebagai apresiasi diri.

7. Sarana Olahraga dan Lapangan Terbuka

Sarana yang memiliki fungsi yang sangat penting karena disamping fungsi utamanya sebagai ruang rekreasi atau taman dalam ruang lingkup perkotaan. Lapangan olahraga juga memberikan kesegaran pada kota serta dapat juga sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Keberadaan sarana dalam suatu kawasan permukiman maupun lingkungan kehidupan merupakan hal penting dalam mendukung kegiatan masyarakat serta berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa jenis sarana antara lain sebagai berikut:

- a. Sarana pendidikan, berdasarkan standar perencanaan sarana Departemen Pekerjaan Umum tahun 1987 jenis-jenis sarana pendidikan adalah TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
- b. Sarana kesehatan, berdasarkan standar perencanaan sarana Departemen Pekerjaan Umum tahun 1987 jenis-jenis sarana kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas, apotek, BKIA (Rumah Sakit Bersalin/Klinik) dan praktek dokter. Dalam penelitian ini jenis sarana yang dikaji adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik kesehatan desa (PKD).
- c. Sarana perbelanjaan dan niaga, jenis-jenis sarana yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah departemen store, pusat pertokoan, pertokoan dan pasar tradisional.
- d. Sarana peribadatan, penyediaan sarana peribadatan tergantung dari kebutuhan serta keputusan masyarakat setempat. Jenis sarana yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah masjid, mushola, gereja, vihara dan pura.

- e. Sarana olahraga dan lapangan terbuka, penyediaan sarana ini sangat diperlukan sebagai penyeimbang ekologis dan penyangga kehidupan perkotaan. Jenis sarana yang akan dikaji adalah lapangan olahraga saja.

2.4.4 Penyediaan Sarana Perkotaan

Penyediaan sarana perkotaan di suatu daerah harus menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada daerah tersebut. Sehingga dalam pengadaan sarana perkotaan sesuai dengan kebutuhan penduduk. Acuan/standar yang digunakan oleh para perencana, pengembang dan perancang kawasan serta pemerintah daerah bagian perencanaan dalam menentukan jumlah sarana di suatu daerah adalah dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan. Asumsi dasar dalam penentuan satuan unit lingkungan menurut jumlah penduduk adalah sebagai berikut

1 RT	: terdiri dari 150-250 jiwa penduduk
1 RW	: terdiri dari 8-10 RT (2.500 jiwa penduduk)
1 kelurahan (\approx lingkungan)	: terdiri dari 10-12 RW (30.000 jiwa penduduk)
1 kecamatan	: terdiri dari 4-6 kelurahan/lingkungan (120.000 jiwa penduduk)
1 kota	: terdiri dari sekurang-kurangnya 1 kecamatan.

Berikut tabel ketentuan penyediaan sarana perkotaan berdasarkan SNI 03-1733-2004.

Tabel II. 1
Standar Tata Cara Perencanaan Lingkungan dan Perumahan di Perkotaan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Radius Pencapaian
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)	
Sarana Pendidikan					
1.	TK	1.250	216	500	500 m
2.	SD	1.600	633	2.000	1.000 m
3.	SMP	4.800	2.282	9.000	1.000 m
4.	SMA	4.800	3.835	12.500	3.000 m
Sarana Kesehatan					
1.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	1.000 m
2.	Puskesmas Pembantu	30.000	150	300	1.500 m
Sarana Peribadatan					
1.	Musholla	250	45	100	100 m
2.	Masjid Lingkungan	30.000	1.800	3.600	

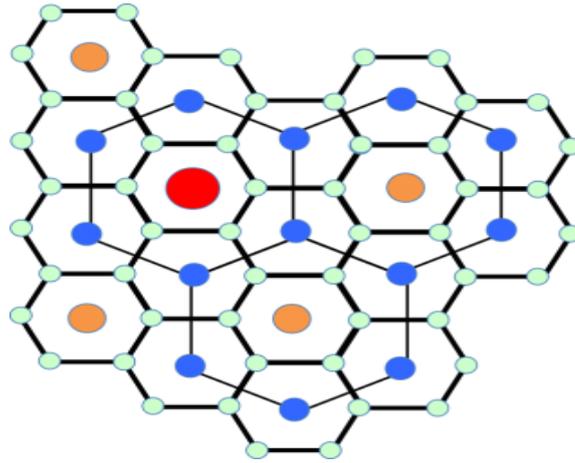
No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Radius Pencapaian
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lantai Min. (m ²)	
3.	Sarana Ibadah Agama Lain (Gereja, Vihara, Pura)	Tergantung sistem kekerabatan/hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-
Sarana Perdagangan dan Niaga					
1.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	2.000 m
2.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	
Sarana Lapangan Olahraga dan Ruang Terbuka					
1.	Taman dan Lapangan Olahraga	30.000		9.000	

Sumber : Tata Cara Perencanaan lingkungan dan Perumahan di Perkotaan SNI 03-1733-2004

2.5 Teori Tempat Pusat

Christaller (1933) mempublikasikan suatu tulisan berjudul: "Central Places In South Germany" dalam Sumaatmadja (1988:121). Tulisan tersebut mengetengahkan perhatian Christaller terhadap penyebaran pemukiman, desa dan kota-kota yang berbeda-beda ukuran luasnya. Penyebaran tersebut kadang-kadang bergerombol atau berkelompok, dan kadang-kadang terpisah jauh satu sama lain. Losch (1945) dalam Sumaatmadja (1988:121) seorang ahli ekonomi Jerman memperkuat teori Christaller. Cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan kepada penduduk yaitu dengan menempatkan aktivitas yang demikian pada hierarki pemukiman yang luasnya meningkat yang lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Jadi, lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan penduduk itu harus ada pada tempat yang sentral.

Tempat yang lokasinya sentral adalah tempat yang memungkinkan partisipasi manusia yang jumlahnya maksimum, baik yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang dan pelayanan yang dihasilkannya. Christaller dan Losch mengasumsikan tempat semacam itu sebagai titik simpul-simpul dari suatu bentuk geometrik yang heksagonal yang memiliki kawasan pengaruh terhadap daerah sekitarnya. Hubungan dan lokasi tempat-tempat yang sentral dengan tempat yang sentral disekitarnya, membentuk hierarki jaringan seperti sarang lebah. Bentuk tersebut digambarkan pada gambar berikut:



Sumber : Google Pictures,2016

Gambar II. 1
Hierarki Tempat Pusat yang Membentuk Sarang Lebah

Dalam Robinson (2005:79), Christaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah dengan asumsi sebagai berikut:

1. Wilayahnya adalah dataran tanpa romen, semua adalah datar dan sama.
2. Pergerakan dapat dilakukan ke segala arah (*isotropic surface*).
3. Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah.
4. Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak/biaya.

Menurut asumsi dan observasi Christaller (1933) dalam Sumaatmadja (1988:123), suatu tempat sentral memiliki tiga karakteristik. Ketiganya sejalan karena merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya pola geometris wilayah pelayanan suatu tempat pusat. Ketiga karakteristik tersebut adalah:

1. Memiliki ambang penduduk (*Threshold Population*)
Ambang penduduk adalah jumlah penduduk minimum untuk dapat mendukung suatu penawaran akan jasa. Dalam hal ini, jasa yang ditawarkan adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh sarana-sarana yang ada ditempat pusat tersebut. Bila jumlah penduduk yang dilayani berada dibawah ambang, maka pelayanan tersebut akan menjadi kurang baik dan kurang efektif.
2. Memiliki jangkauan pasar/wilayah cakupan layanan (*Market Range*)
Jangkauan pasar suatu aktifitas jasa adalah jarak yang seseorang bersedia untuk menempuhnya untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan. Lebih jauh dari jarak ini orang yang bersangkutan akan mencari tempat lain yang lebih dekat untuk

memenuhi kebutuhan akan jasa yang sama. Jangkauan pasar setiap kegiatan pelayanan jasa akan saling berbeda-beda, tergantung pada arti pentingnya suatu tempat pusat/pelayanan jasa tersebut.

3. Memiliki struktur hirarki pelayanan

Struktur hirarki pelayanan kegiatan jasa dari mulai tingkatan yang paling tinggi seperti pada tingkatan kota, sampai pada tingkatan yang paling rendah seperti tingkatan desa.

Ketiga unsur tersebut dikatakan penting karena:

- a. Terdapatnya penduduk ambang pada batas tertentu menyebabkan suatu sarana terbentuk bila penduduknya telah mencapai atau melebihi batas ambang. Sehingga sarana yang ada memiliki potensi untuk dikembangkan.
- b. Lokasi pusat pelayanan yang ada harus berada di tempat-tempat yang aksesibilitasnya mudah dijangkau. Sehingga penduduk yang akan melakukan aktivitas dengan sarana pendukungnya dapat berjalan lancar.
- c. Suatu hirarki dapat menunjukkan golongan atau tingkatan suatu pelayanan, dimana tingkatan tersebut berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan sarana yang tersedia. Sehingga dengan melihat hirarki yang ada dapat mengetahui daerah dengan ketersediaan sarana tertinggi hingga terendah serta untuk menentukan daerah yang lebih berpotensi untuk berkembang.

Teori tempat sentral yang dikemukakan Christaller (1933) dalam Sumaatmadja (1988:125-126), selain dapat digunakan untuk menganalisa pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi yang sudah ada terhadap daerah sekitarnya, dapat juga digunakan untuk merencanakan suatu lokasi kegiatan. Perencanaan lokasi pusat perniagaan, pasar, rumah sakit, sekolah dan pelayanan sosial lainnya. Mengingat adanya perkembangan teknologi, kemajuan komunikasi-transportasi, kondisi fisis setempat dan lain-lain sebagainya. Teori ini harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut.

2.6 Hierarki Perkotaan

Hierarki perkotaan sangat terkait dengan hierarki sarana kepentingan umum yang ada di masing-masing kota. Hierarki perkotaan dapat membantu untuk menentukan sarana apa yang harus ada atau perlu dibangun di masing-masing kota. Sarana perkotaan bukan hanya menyangkut jenisnya, tetapi juga kapasitas pelayanan dan kualitasnya. Tujuan pengaturan adalah agar terdapat efisiensi biaya pembangunan dan perawatan sarana tidak berlebihan namun masyarakat pun dapat terlayani tanpa mengorbankan biaya yang

berlebihan untuk mendatangi sarana yang letaknya jauh. Kota-kota yang tersebar di dataran sebagaimana yang diasumsikan oleh Christaller (1933) dalam Daldjoeni (1992), kota-kota tersebut menyajikan berbagai barang dan jasa untuk wilayah di sekelilingnya dengan membentuk suatu *hierarki*. Untuk melayani permintaan tempat-tempat kecil yang tersebar luas, disediakan barang dan jasa tingkat rendah. Kota-kota yang melayani barang dan jasa tingkat rendah dan tinggi sekaligus, jumlahnya pasti lebih sedikit. Makin tinggi tingkat barang dan jasa, maka makin besar rangenya dari penduduk di tempat kecil; di kota-kota besar terdapatlah pasar yang besar (Daldjoeni, 1992:106).

Makin besar suatu kota, makin beragam sarana yang disediakan sehingga semakin luas wilayah pengaruhnya. Suatu kota yang besar selain memiliki daerah belakang yang berupa daerah pertanian juga beberapa kota kecil. Apabila kota kecil banyak tergantung dari kota besar maka kota kecil termasuk dalam daerah pengaruh dari kota yang lebih besar. Biasanya kota yang paling besar wilayah pengaruhnya, diberikan rangking satu atau orde kesatu, yang lebih kecil berikutnya diberi rangking dua, dan seterusnya. Kota orde kesatu tidak merupakan subordinat kota lain. Kota orde dua berada dalam subordinat kota rangking kesatu dan kota orde ketiga berada dalam subordinat kota orde kedua dan seterusnya (Robinson, 2005).

Hirarki pelayanan menurut Rondinelli dan Ruddle, di negara sedang berkembang dapat dibagi menjadi empat tingkatan pelayanan, yaitu (Rondinelli dan Ruddle, 1978:64-67, 175-180):

a. Pusat Desa (*Village Service Center*)

Merupakan pemukiman dengan berbagai kriteria, yaitu: Pertama, menyediakan berbagai sarana dan pelayanan dasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk di sekitar wilayah perdesaan. Kedua, memiliki sarana yang diperlukan untuk memacu kegiatan non-pertanian yaitu aktifitas industri skala kecil (industri rumah tangga) dan meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga, merupakan pusat yang menyediakan pelayanan dasar dan berbagai kebutuhan rumah tangga dan kegiatan pertanian bagi desa-desa terpencil dan wilayah pertanian yang terisolasi. Keempat, memiliki organisasi kemasyarakatan yang dapat meningkatkan partisipasi penduduk dalam melaksanakan pembangunan. Kelima, terletak pada titik simpul (fisik, ekonomi dan sosial) yang menghubungkan wilayah perdesaan dengan kota kecil dan pusat wilayah.

b. Kota Kecil/Kota Pasar (*Market Town: Small City*)

Fungsi utama kota ini adalah untuk kegiatan pemasaran terutama produk pertanian perdesaan dan berperan dalam menghubungkan kehidupan perkotaan dan perdesaan. Hal ini dapat terlaksana dengan adanya berbagai sarana dan kelembagaan untuk koleksi dan distribusi barang dan jasa ke kota yang lebih besar.

c. Kota Menengah Pusat Wilayah Regional (*Regional Centre*)

Pusat wilayah ini berperan penting dalam proses transformasi dan pengembangan ekonomi wilayah serta struktur ruang. Karena secara sosial dan ekonomi kehidupan di kota menengah sangat beragam maka terjadi interaksi antara pola hidup modern (perkotaan) dengan pola hidup tradisional (perdesaan). Kota ini juga berperan dalam menyerap penduduk migran dari desa serta menciptakan suatu mekanisme sehingga penduduk-penduduk dari desa dapat menyesuaikan diri dengan struktur ekonomi kota. Kota ini dilihat dari karakteristik fisiknya, merupakan gabungan antara wilayah yang memiliki karakter desa dengan wilayah yang berkarakter kota.

d. Kota Utama (*Primary City*)

Kota ini berperan sebagai pusat utama dan merupakan tingkat pelayanan paling tinggi dalam melayani seluruh kegiatan dan memiliki kedudukan yang sangat dominan. Adapun kegiatan yang terdapat di kota utama adalah komersial, jasa, administrasi pemerintahan, pendidikan, industri dan perdagangan, dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami transformasi menuju ke kegiatan tersier.

2.7 Metode Penelitian

2.7.1 Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan proyek akhir ini dibutuhkan beberapa data untuk menganalisis hierarki pusat pelayanan pada wilayah studi. Sebagian besar data-data tersebut berasal dari data sekunder yang diambil dari instansi-instansi terkait. Sedangkan, data primer yang ada berupa hasil dokumentasi jenis-jenis sarana di wilayah studi. Berikut kebutuhan data yang digunakan dalam studi ini secara lengkapnya:

Tabel II. 2
Kebutuhan Data

No.	Sasaran	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Analisis	Sumber Data	Tahun
1.	Identifikasi Karakteristik	a. Kondisi Fisik Wilayah Studi	Peta Administrasi	Deskriptif Kualitatif	Bappeda Kab. Tegal	2011
			Peta Litologi			
			Peta Kelerengan			

	Kecamatan Slawi		Peta Curah Hujan			
			Peta Tata Guna Lahan			
		b. Kondisi Demografi Wilayah Studi	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	Deskriptif Kuantitatif	BPS Kecamatan Slawi	2017
			Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Gender			
			Jumlah Penduduk Menurut Agama			
		c. Kondisi Sarana Perkotaan	Jumlah dan Jenis Sarana	Deskriptif Kuantitatif	BPS Kecamatan Slawi	2017
Persebaran Sarana						
2.	Analisis Hierarki Pusat Pelayanan	Ketersediaan dan Jumlah Sarana	Jumlah dan Jenis Sarana	Analisis Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall	BPS Kecamatan Slawi	2017
			Persebaran Sarana			
3.	Ketercukupan Sarana	Jumlah Penduduk dan Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk	Perhitungan Ketercukupan Sarana Berdasar SNI 03-1733-2004	BPS Kecamatan Slawi	2017
			Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur			
			Jumlah Penduduk Menurut Agama			
			Jumlah dan Jenis Sarana			

Sumber : Hasil Analisis, 2018

2.7.2 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penyusunan Proyek Akhir ini adalah analisis hierarki pusat pelayanan dan perhitungan ketercukupan sarana berdasarkan SNI 03-1733-2004. Metode yang digunakan dalam analisis hierarki pusat pelayanan adalah metode Skalogram Guttman dan metode Indeks Sentralitas Marshall.

A. Metode Skalogram Guttman

Metode Skalogram Guttman digunakan untuk menentukan tempat-tempat yang dapat dijadikan tempat pusat serta menentukan wilayah yang terkena pengaruhnya (Rondinelli, 1985). Fungsi Skalogram Guttman adalah untuk mengidentifikasi hierarki pusat-pusat permukiman dengan melihat kelengkapan jenis sarana secara fungsi maupun aktivitas yang terdapat di setiap kecamatan. Secara teknis, perhitungan Skalogram Guttman dengan menggunakan tabel yang terdiri dari dua variabel yaitu wilayah dan jenis sarana yang tersedia di masing-masing wilayah tersebut. Prosedur penggunaan metode Skalogram Guttman adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi semua kawasan perkotaan yang ada;
2. Buat urutan wilayah berdasarkan jumlah penduduk pada bagian sebelah kiri tabel kerja;

3. Membuat urutan sarana yang ditentukan berdasarkan frekuensi yang ditentukan pada bagian atas tabel kerja;
4. Membuat matriks yang berisi kelengkapan dari tiap jenis-jenis sarana pada masing-masing wilayah;
5. Memberi tanda (1) pada sel yang menyatakan keberadaan suatu sarana dan tanda (0) pada sel yang menyatakan ketiadaan suatu sarana;
6. Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan jumlah keberadaan sarana. Semakin banyak sarana yang didapati pada suatu wilayah, maka wilayah tersebut berada pada tingkat paling atas. Begitupun jenis sarana dengan jumlah paling lengkap berada pada posisi paling kiri.
7. Mengidentifikasi hierarki wilayah yang dapat diinterpretasikan berdasarkan prosentase keberadaan sarana pada suatu wilayah. Semakin tinggi prosentasenya, maka hierarki wilayah tersebut semakin tinggi.

Hasil perhitungan skalogram perlu diuji kelayakannya dengan menggunakan persamaan *Coefisien of Reproducibility* (COR). Apabila hasil perhitungan COR bernilai 0,9-1 maka hasil perhitungan skalogram dapat diterima dan dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Rumus dari *Coefisien of Reproducibility* (COR) adalah sebagai berikut:

$$COR = 1 - \frac{\text{Jumlah Kesalahan}}{\text{Jumlah Wilayah} \times \text{Jumlah Fasilitas}}$$

B. Metode Indeks Sentralitas Marshall

Metode Indeks Sentralitas Marshall digunakan untuk melihat kemampuan pelayanan suatu pusat yang ditinjau berdasarkan jumlah unit sarana yang terdapat pada pusat pelayanan. Nilai keterpusatan dapat diperoleh dari jumlah total bobot masing-masing jenis sarana dikalikan jumlah sarana tersebut. Prinsip pembobotan suatu sarana dilakukan dengan cara membagi nilai sentralitas gabungan (100) dengan jumlah sarana yang terdapat di seluruh pusat pelayanann jadi semakin banyak jumlah suatu sarana maka bobotnya akan semakin kecil demikina pula sebaliknya (Rondinelli, 1985:125).

Metode Indeks Sentralitas Marshall juga digunakan dengan tujuan menilai kemampuan dan hierarki pusat pelayanan, seperti halnya analisis Skalogram Guttman. Setelah disusun matriks seperti pada tebal skalogram, kemudian dihitung nilai skornya dengan menjumlahkan nilai indeks sentralitas dari tiap sarana yang dimiliki. Sehingga muncul pusat-pusat pelayanan yang

dikelompokan berdasarkan nilai sentralitasnya. Secara teknis lengkapnya, berikut langkah-langkah perhitungan Indeks Sentralitas Marshall:

1. Membuat matriks seperti matriks pada perhitungan skalogram;
2. Menjumlahkan tiap kolom dan baris;
3. Membobotkan terhadap seluruh jenis sarana yang merupakan nilai sentralitas gabungan. Dalam pembobotan ini diasumsikan bahwa nilai sentralitas setiap jenis sarana dianggap sama, maka asumsi nilainya adalah 100.
4. Pembobotan terhadap jumlah dari tiap jenis sarana. Pembobotan ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Rondinelli, 1985:125):

$$C = \frac{t}{T}$$

Keterangan:

- C = Bobot dari atribut fungsional suatu sarana
t = Nilai sentralitas gabungan (100)
T = Jumlah total dari tiap jenis sarana

5. Berdasarkan rumus pembobotan tersebut dapat dihitung nilai pelayanan sarana suatu wilayah sebagai berikut:
 - a. Mengalikan bobot atau jenis sarana dengan satuan yang bersangkutan di setiap wilayah.
 - b. Menjumlahkan perkalian tersebut dengan bentuk tiap wilayah.
 - c. Menambahkan pada matriks tersebut sebanyak 2 kolom di tiap jenis sarana dan 1 kolom pada sisi paling kanan, dimana:
 - Kolom 1 untuk nilai sentralitas gabungan (100)
 - Kolom 2 untuk nilai sentralitas sarana ($C=t/T$)
 - Kolom 3 untuk nilai total sentralitas di tiap wilayah
 - d. Menyusun urutan wilayah berdasarkan nilai total sentralitas. Semakin besar nilai total sentralitas, maka semakin tinggi pula tingkat hierarki serta berada pada paling atas.

Untuk menentukan banyaknya kelas dalam menentukan jumlah hierarki yang dikehendaki dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Banyaknya Kelas} = 1 + 3,3 \text{ Log}$$

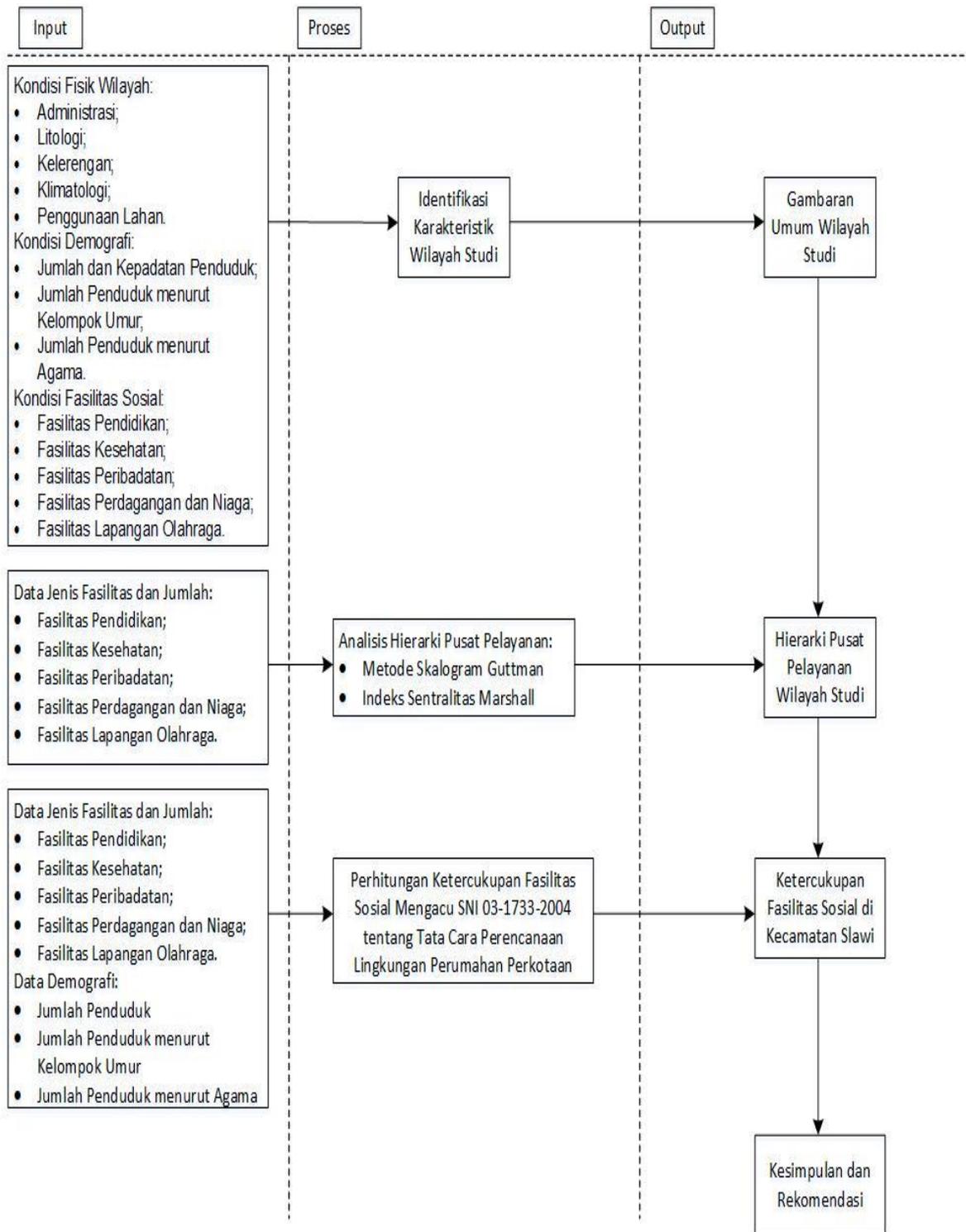
Untuk memperoleh kelas dengan panjang interval tertentu, maka perlu menghitung banyaknya kelas terlebih dahulu kemudian dihitung intervalnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Panjang Interval} = \frac{\text{Bobot IS Tertinggi} - \text{Bobot IS Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

2.7.3 Kerangka Analisis

Dalam mengidentifikasi hierarki pusat pelayanan di Kecamatan Slawi dibutuhkan sebuah alur analisis sebagai panduan dalam melakukan berbagai analisis terkait. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik Kecamatan Slawi untuk mendapatkan gambaran umum wilayahnya dengan menggunakan data-data kondisi fisik wilayah, kondisi demografi dan kondisi sarana perkotaan.

Setelah itu dilakukan analisis hierarki pusat pelayanan untuk mendapatkan hierarki pusat pelayanan di Kecamatan Slawi dengan menggunakan data-data sarana perkotaan. Tahap selanjutnya adalah menghitung kebutuhan sarana perkotaan guna menghasilkan kecukupan sarana perkotaan di Kecamatan Slawi dengan menggunakan data-data sarana perkotaan dan data demografi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan berikut :



Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar II. 2
Kerangka Analisis